



Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

(Studi Empiris di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung)

Engelien Yusniar Permanasari^{1*}, Soebiantoro²

¹⁻² Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: engelien77@gmail.com

Abstract: *This research holds significant urgency as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are key drivers of the local economy and play an important role in improving community welfare. The purpose of this study is to analyze the local government's strategies in empowering MSMEs, to determine the effectiveness of the strategies implemented, and to identify the challenges and opportunities in MSME empowerment. This study employs a qualitative approach with a descriptive qualitative research design. Data were collected using purposive sampling through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that the strategies of the Department of Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises of Tulungagung Regency in empowering the MSME sector are carried out through three main approaches: human resource empowerment strategies, supporting strategies, and institutional strategies. Human resource empowerment is implemented by fostering new entrepreneurs through entrepreneurship training. Supporting strategies are carried out by organizing MSME product exhibitions both online and offline as an effort to expand market reach. Meanwhile, institutional strategies are implemented through the formation of business groups, cooperative empowerment, and strengthening the capacity and quality of community enterprises. However, the implementation of these strategies faces several internal obstacles, including limited budgets that prevent regular training, low competence and professionalism of human resources, and a conservative mindset among the community that hinders innovation. In addition, the lack of public support and appreciation for local products also contributes to the slow development of the MSME sector in Tulungagung Regency.*

Keywords: *Empowerment; Human Resource; Local Government; MSMEs; Strategy*

Abstrak: Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, mengetahui efektivitas strategi yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pemberdayaan UMKM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dalam hal ini penelitian yang menggunakan *purposive sampling* dalam menggali data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data peroleh peneliti menganalisis data dengan melakukan *data condensation*, *data display*, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan sektor UMKM dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu strategi pemberdayaan sumber daya manusia, strategi pendukung, dan strategi kelembagaan. Pemberdayaan SDM dilakukan dengan menumbuhkan wirausaha baru melalui pelatihan kewirausahaan. Strategi pendukung dilaksanakan dengan mengadakan pameran produk UMKM baik secara online maupun offline sebagai upaya memperluas pasar. Sedangkan strategi kelembagaan dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha, pemberdayaan koperasi, serta penguatan kapasitas dan kualitas usaha masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi ini menghadapi beberapa hambatan internal, antara lain keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara rutin, rendahnya kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia, serta paradigma masyarakat yang masih konservatif dan kurang berani berinovasi. Selain itu, rendahnya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap produk lokal juga menjadi faktor penghambat berkembangnya sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Pemerintah Daerah; SDM; Strategi; UMKM

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah diharapkan dapat menjangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan mereka menuntut pemerintah untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur menjadi hal yang sangat penting agar kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan memenuhi harapan publik. Administrasi publik menurut Pasalong (2008) menjelaskan bahwa proses ini merupakan upaya koordinasi antara sumber daya dan masyarakat untuk merumuskan, melaksanakan, serta mengelola berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk mampu menampung dan mengelola aspirasi masyarakat secara efektif agar tujuan pembangunan modern dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Salusu (1996) menyatakan bahwa strategi dapat dipahami sebagai seni memanfaatkan kemampuan serta sumber daya organisasi melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan untuk memperoleh kondisi yang paling menguntungkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang organisasi, strategi merupakan suatu rencana atau program yang dirancang untuk menetapkan dan mewujudkan tujuan serta misi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer memiliki peran yang aktif, sadar, dan rasional dalam proses perumusan serta pelaksanaan strategi organisasi.

Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah menekankan pada kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan kesatuan nasional.

Daya saing daerah, atau *competitiveness* dalam bahasa Inggris, umumnya digunakan dalam konteks ekonomi dan diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk berkompetisi. Pada tingkat nasional, konsep daya saing sering dikaitkan dengan hasil atau produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Sementara itu, menurut Bank Dunia (World Bank), daya saing

merujuk pada tingkat serta kecepatan perubahan nilai tambah yang dihasilkan per satuan input oleh suatu perusahaan (Abdullah, 2002).

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012) mengartikan Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kesempatan serta meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan (*voice*), serta kemampuan untuk menentukan pilihan (*choice*) terhadap konsep, metode, produk, atau tindakan yang dianggap paling sesuai bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan kapasitas dan sikap mandiri dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan, Ambar (2004) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang bersifat produktif dan mandiri, dijalankan oleh individu maupun badan usaha, yang bergerak dalam berbagai bidang atau sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) biasanya ditentukan berdasarkan nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), rata-rata omzet tahunan, atau jumlah tenaga kerja tetap yang dimiliki. Namun, kriteria penentuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan indikator tersebut bervariasi di setiap negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan antar sektor. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi berskala kecil dan menengah menjadi prioritas utama untuk mewujudkan fondasi ekonomi yang kuat. Namun, dalam menjalankan perannya dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu berfokus pada penyusunan kebijakan dan program, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lapangan. Pemberdayaan UMKM berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar daerah. Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pengembangan kapasitas dan akses terhadap sumber daya produktif (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah, 2024).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi beberapa aspek penting. Pertama, rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Kedua, keterbatasan akses terhadap sumber permodalan yang membuat UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usaha maupun mengembangkan produk yang kompetitif. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan solusi melalui berbagai kebijakan kredit bersubsidi, akses terhadap program tersebut masih terbatas bagi sebagian besar pelaku UMKM. Ketiga, kemampuan dalam penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih tergolong rendah, sementara peningkatan di bidang tersebut membutuhkan biaya besar yang sulit dijangkau oleh UMKM secara mandiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu merumuskan strategi pemberdayaan yang efektif melalui pendekatan sentra dan *Business Development Services* (BDS) (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2024). Kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor UMKM di Tulungagung menjadi salah satu faktor utama pendorong pembangunan ekonomi lokal yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per Tahun 2024.

Keterangan	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha Kecil	33.976	37.034	39.256	40.729	44.086
Usaha Menengah	9.031	9.844	10.434	10.815	11.707
Usaha Besar	44.633	48.650	51.569	53.488	57.897
Jumlah	44,633	48,650	51,569	53,488	57,897

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan rata-rata 9,83%. Hal ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami perkembangan walaupun

setiap tahunnya sedikit, tapi secara stabil mengalami perkembangan yang pesat. Berikut ini perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan seluruh Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan UMKM Tingkat Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Sektor Pertanian UMKM
1	Pagerwojo	853
2	Bandung	1.520
3	Tanggung Gunung	566
4	Karangrejo	2.365
5	Kedungwaru	3.163
6	Sendang	1.466
7	Campurdarat	1.508
8	Rejotangan	1.623
9	Pakel	1.142
10	Boyolangu	1.544
11	Kalidawir	3.123
12	Ngunut	2.282
13	Kauman	988
14	Gondang	5.143
15	Sumbergempol	1.828
16	Tulungagung	502
17	Pucanglaban	639
18	Ngantru	658
19	Besuki	386
	Jumlah	31.299

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, permasalahan umum yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung juga disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya, lemahnya kreativitas dan inovasi, lemahnya kemampuan dalam membaca peluang yang ada, permodalan usaha, serta lemahnya strategi pemasaran (*marketing*). Sistem jaringan yang masih kurang juga menjadi permasalahan pokok, karena sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan apabila kurang promosi dalam hal pemasaran juga tidak mampu bersaing (Hasil observasi dan pra riset di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung).

Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini

tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang di Kabupaten Tulungagung ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Permasalahan-permasalahan itu antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha; 2) Motivasi yang lemah untuk mengembangkan usaha. Fasilitas pemodalan pembinaan, adapun Sumber Daya Manusia (SDM) selaku pelaku usaha masih kurang dalam pemanfaatan teknologi yang ada, hal ini diperlukan adanya pembinaan-pembinaan lanjutan dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024). Bersamaan dengan masalah tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Selain itu, beberapa masalah lainnya meliputi ratusan koperasi di Kabupaten Tulungagung dinyatakan tidak sehat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini di Tulungagung ada sekitar 961 koperasi, yang didominasi oleh koperasi wanita. 58 koperasi di antaranya butuh pendampingan khusus lantaran kondisinya yang dinyatakan sekarat. Hal tersebut disebabkan oleh buruknya manajemen dan kredit macet menjadi masalah klasik dunia perkoperasian di Kabupaten Tulungagung.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah kelembagaan dalam beberapa koperasi di Kabupaten Tulungagung, kepengurusan atau aktifitasnya yang perlu didorong agar kembali lurus. Dari 961 koperasi, total aset yang dikelola mencapai 60 milyar dengan 120 ribuan anggota aktif. Jenis usaha koperasi untuk tabungan ada 2. Setiap orang yang menjadi anggota koperasi cukup mempunyai simpanan pokok dan membayar iuran wajib. Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung sangat beragam. Namun sayang tidak sampai 20 persen produk tersebut yang dipasarkan di toko modern. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sampai saat ini terdapat 89 Toko Modern di Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan peraturan yang ada, idealnya 20% produk yang dijual di Toko Modern tersebut harus berisi produk dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Tulungagung. Belum semua produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) siap memenuhi standart yang disyaratkan oleh pasar.

Jumlah produk UMKM yang berada di Kabupaten Tulungagung sejumlah 572 produk berikut data produk UMKM Kabupaten Tulungagung tahun 2024:

Tabel 3. Data Produk UMKM di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.

No	Kecamatan	Produk					Total
		Craft	Makmin	Konveksi	Palen	Hydroponik	
1	Tulungagung	4	19	7	-	-	30
2	Kedungwaru	9	6	-	-	1	16
3	Kauman	11	43	7	13	7	81
4	Karangrejo	13	20	5	10	17	65
5	Ngunut	9	45	1	1	28	84
6	Boyolangu	8	66	5	24	63	166
7	Ngantru	1	45	1	33	50	130
Total							572

Sumber: *Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produk UMKM yang berada di Kabupaten Tulungagung sejumlah 572 produk dengan rincian, Kecamatan yang memiliki total produk terbesar adalah Kecamatan Boyolangu dimana pada kecamatan tersebut memiliki jumlah produk 166 produk, dengan produk unggulan ialah makanan minuman sejumlah 66 produk, dan yang menempati posisi kedua adalah Kecamatan Ngantru dengan total produk 130 produk, dengan keunggulan produk hydroponik. Melihat data diatas dari tiap kecamatan memiliki produk unggulan masing-masing namun dapat dilihat dalam data masih terlihat belum adanya pemerataan, sehingga peran dari Dinas Koperasi dan UMKM dapat lebih digali lagi agar pemerataan tersebut dapat tercapai yang akan menghasilkan pendapatan yang akan meningkatkan kesejahteraan dari pengusaha UMKM.

Upaya peningkatan akses terhadap pasar, modal, manajemen, dan teknologi, serta penguatan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan untuk memperkuat posisi UMKM dalam persaingan pasar dan menjalin kemitraan yang sinergis dengan BUMN dan sektor swasta. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berupaya merumuskan berbagai strategi guna mengatasi tantangan tersebut, meliputi strategi kelembagaan, pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM di daerahnya. Penelitian mengenai *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung menjadi relevan karena berkaitan langsung dengan dinamika ekonomi lokal serta arah kebijakan pemerintah daerah. *State of the art* dari penelitian ini mencakup analisis strategi pemberdayaan UMKM yang efektif, identifikasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta pengembangan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan UMKM di

Kabupaten Tulungagung, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik pemberdayaan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Juni 2025 sampai akhir bulan Oktober 2025 dimana peneliti datang kelokasi dengan melakukan wawancara secara langsung dan mengambil data-data yang diperlukan untuk proses penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian dilakukan dengan menggali informasi atau fakta-fakta mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dengan data yang digunakan berupa catatan-catatan verbal atau semi struktur dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti (Fitri and Haryanti 2020). Pendekatan penelitian kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Moleong 2002).

Peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif dalam penelitian ini. Menurut Fitri and Haryanti (2020) penelitian bertipe deskriptif ini memiliki batasan pada usaha peneliti dalam memaparkan suatu masalah, keadaan dan atau peristiwa dengan apa adanya sehingga bersifat hanya sekedar memaparkan fakta atau *fact finding*. Tipe Penelitian deskriptif memberikan keterangan secara sistematis, faktual atau nyata, dan juga akurat tentang fakta, sifat juga situasi yang diselidiki. Dengan Tipe penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan sekaligus menjelaskan dan menganalisis

Metode penentuan informan penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang melalui wawancara dengan subjek/ narasumber yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung yang digunakan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan sebagainya.

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap kepala Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung selain itu wawancara dilakukan terhadap informan tambahan yang merupakan pelaku UMKM. Adapun metode dokumentasi berupa data-data tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan data jumlah karyawan, kegiatan UMKM.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi (*documentation*), dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta dilanjutkan dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2018)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada apa yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana yaitu: Kondensasi Data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), Verifikasi Data (*conclusion drawing/verification*). (Sugiyono 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini terkait strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan: 1) Strategi pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara pemberdayaan penumbuhan wirausaha baru dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan. 2) Strategi pendukung dalam pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jalan pengadaan pameran untuk keanggotaan UMKM dalam memamerkan produk usahanya. Hal ini dilakukan sebagai penetrasi pasar melalui *online* dan *offline*. 3) Strategi kelembagaan dalam pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan: dengan pembentukan kelompok, pemberdayaan koperasi dan pengembangan usaha dengan penguatan kapasitas dan kualitas usaha masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui kegiatan ini pelaku ekonomi mampu mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Glueck dan Jauch (1994) mendefinisikan strategi sebagai suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya, untuk menjamin terciptanya tujuan perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Suhendra (2006) antara lain kemauan politik yang mendukung, suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh, motivasi, potensi masyarakat, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, perlindungan, dan kesadaran. Strategi pemberdayaan merupakan cara, metode yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan program pemberdayaan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi (Ambar, 2004). Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap.

a. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Pada tahap awal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya peningkatan kapasitas diri, pengelolaan usaha yang efektif, serta kesadaran terhadap peluang dan tantangan ekonomi lokal. Kegiatan penyadaran dilakukan melalui pelatihan dasar kewirausahaan, seminar motivasi usaha, serta pendampingan kelompok UMKM di berbagai kecamatan. Tujuan utama tahap ini adalah menumbuhkan sikap sadar dan peduli di kalangan pelaku UMKM agar mereka memiliki keinginan untuk berubah, meningkatkan kapasitas diri, dan memahami pentingnya peran mereka dalam pembangunan ekonomi daerah. Tahap ini juga menciptakan pra-kondisi agar pelaku usaha siap menerima intervensi program pemberdayaan secara efektif.

b. Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap ini berfokus pada peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dasar pelaku UMKM. Pemerintah Daerah Tulungagung mengimplementasikannya melalui berbagai program pelatihan teknis dan manajerial seperti pelatihan pengelolaan keuangan usaha, digital marketing, peningkatan kualitas produk, dan sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk memberikan pelatihan berbasis kebutuhan pasar. Transformasi kemampuan ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Dengan demikian, pelaku

UMKM mulai beralih dari posisi sebagai objek pembangunan menjadi subjek aktif yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal.

c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Keterampilan Inovatif

Pada tahap ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM agar mampu berinovasi dan menciptakan produk unggulan yang memiliki daya saing tinggi. Implementasinya dilakukan melalui program inkubasi bisnis, pendampingan inovasi produk, fasilitasi akses permodalan, dan pembentukan jejaring kemitraan dengan BUMN maupun sektor swasta. Pemerintah juga menyediakan platform promosi digital dan pameran produk untuk memperluas akses pasar. Melalui proses ini, pelaku UMKM diharapkan mampu berpikir kreatif, mengembangkan ide baru, dan mengambil inisiatif dalam mengelola usahanya secara mandiri. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan munculnya pelaku UMKM yang inovatif, berdaya saing, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Widhajati (2019) yang menyatakan bahwa pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu keharusan yang melibatkan berbagai pihak. Kriteria usaha yang tergolong dalam kategori UMKM telah diatur secara hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Maghfiroh dan Rahmawati (2021), pengembangan UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kontribusi penting UMKM terhadap ekonomi adalah kemampuannya dalam menciptakan dinamika ekonomi melalui fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis, yang bahkan lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Selain itu, UMKM berperan signifikan dalam menekan angka pengangguran; ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak pekerja yang beralih menjadi pelaku UMKM (Widhajati & Wulandari, 2024). Oleh karena itu, pengembangan sektor swasta, termasuk UMKM, menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dilakukan secara kolaboratif. Penguatan UMKM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Hambatan internal dalam Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung: 1) Hambatan strategi dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan diantaranya terbatasnya anggaran dana. Pelatihan harusnya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan usaha binaan. Namun kenyataannya Dinas Koperasi dan UMKM belum bisa sepenuhnya memenuhi

permintaan usaha binaan karena terbatasnya anggaran dana, 2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pemberdayaan UMKM, seharusnya di masa pandemic covid seperti ini masyarakat malah kreatif, membuka usaha yang dapat menambah penghasilan. Selain itu Kualitas SDM yang belum profesional, dan paradigma masyarakat yang konservatif masih takut untuk mencoba dan malas untuk mencari wawasan.

Menurut Tulus Tambunan (2012) penumbuhan iklim usaha dapat melalui dukungan dari lembaga yaitu mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selain itu juga dapat melalui pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Hambatan internal dalam Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung yaitu dukungan masyarakat yang masih rendah, menyebabkan pemberdayaan sector UMKM terhambat perkembangannya. Apa jadinya jika suatu usaha, tanpa adanya apresiasi dari masyarakat bisnis juga tidak begitu berkembang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan: 1) Strategi pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara pemberdayaan penumbuhan wirausaha baru dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan. 2) Strategi pendukung dalam pemberdayaan sector usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jalan pengadaan pameran untuk keanggotaan UMKM dalam memamerkan produk usahanya. Hal ini dilakukan sebagai penetrasi pasar melalui *online* dan *offline*. 3) Strategi kelembagaan dalam pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan: dengan pembentukan kelompok, pemberdayaan koperasi dan pengembangan usaha dengan penguatan kapasitas dan kualitas usaha masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM melalui kegiatan ini pelaku-pelaku ekonomi mampu mengembangkan usahanya.

Hambatan internal dalam Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kabupaten Tulungagung: 1) Hambatan strategi dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan diantaranya terbatasnya anggaran dana. Pelatihan harusnya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan usaha binaan. Namun kenyataannya Dinas Koperasi dan UMKM belum bisa sepenuhnya memenuhi permintaan usaha binaan karena terbatasnya anggaran dana, 2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat pemberdayaan UMKM, seharusnya di masa pandemic covid seperti ini masyarakat malah kreatif, membuka usaha yang dapat menambah penghasilan. Selain itu Kualitas SDM yang belum profesional, dan paradigma masyarakat yang konservatif masih takut untuk mencoba dan malas untuk mencari wawasan. Hambatan internal dalam Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung yaitu dukungan masyarakat yang masih rendah, menyebabkan pemberdayaan sector UMKM terhambat perkembangannya. Apa jadinya jika suatu usaha, tanpa adanya apresiasi dari masyarakat bisnis juga tidak begitu berkembang.

Implikasi dari penelitian tentang strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan UMKM perlu diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efektivitas program pendukung, serta penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada pelatihan dan fasilitasi modal, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat agar strategi pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian, inovasi, dan daya saing ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., dkk. (2002). *Daya saing daerah: Konsep dan pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Eni Widhajati & Esti Wulandari. (2024). Strategi pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung. *Journal of Accounting and Tax*, 03(01).
- Fitri, A. Z., & Haryanti, N. (2020). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, mixed method dan research and development*. Malang: Madani Media.

- Glueck, W. F., & Jauch, L. R. (1994). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan* (terj.). Jakarta: Erlangga.
- Maghfiroh, A., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan UMKM melalui peran serta strategi dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jombang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1–12. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.933>
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2008). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non-profit*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra. (2006). *Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Totok, M., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widhajati, E. (2019). Strategi pemasaran online terhadap peningkatan penjualan UMKM di PLUT KUMKM Tulungagung. *Benefit*, 6(1), 58–66.